

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem pendidikan nasional berupaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih layak dimiliki oleh setiap manusia. Tuntutan akan pemenuhan hak dasar manusia tersebut tidak dapat di tawar-tawar lagi, karena disadari, hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi ini. Namun kenyataan yang terdapat di Indonesia sekarang ini angka putus sekolah masih tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingginya biaya pendidikan dan keterbatasan ekonomi orangtua. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia didukung oleh pemaparan dari Mendikbud melalui [kompasiana.com](http://kompasiana.com) yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2007, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persennya, sedangkan 20 persen lainnya harus putus sekolah. Dari 80 persen siswa SD yang lulus sekolah, hanya 61 persennya yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP sekolah yang setingkat lainnya. Kemudian setelah itu hanya 48 persen yang akhirnya lulus sekolah. Sementara itu, 48 persen yang lulus dari jenjang SMP hanya 21

persennya saja yang melanjutkan ke jenjang SMA. Sedangkan yang bisa lulus jenjang SMA hanya sekitar 10 persen. Persentase ini menurun drastis dimana jumlah anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tinggal 1,4 persen saja'. (<http://edukasi.kompasiana.com>).

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990. Pendidikan kesetaraan pada hakekatnya merupakan program pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal, bertujuan untuk memberikan pelayanan setara SD, SMP, SMA atau yang sederajat kepada warga masyarakat karena sesuatu hal kebutuhan pendidikannya tidak mungkin ditempuh melalui jalur pendidikan formal atau mereka yang sadar memilih menempuh jalur pendidikan non formal dan informal untuk menuntaskan pendidikannya.

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Tri Joko Raharjo dan Tri Suminar yang berjudul Studi Peran Pendidikan Nonformal dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Semarang pada Tahun 2005 mengenai Penerapan pedagogi dan andragogi dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan kelompok belajar paket A, B dan C yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam diri sebagian warga belajar yang malas-malasan untuk datang belajar dan sebagainya.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan pada tiap kabupaten di Indonesia bahkan hampir tiap kecamatan tanpa terkecuali di kecamatan Maritengngae yang merupakan salah

satu kecamatan di kabupaten Sidenreng Rappang. Data menunjukkan masih banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Sidrap yang diakibatkan dari berbagai faktor.

Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang terus meningkat di kabupaten ini, membuat pemerintah setempat tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya, salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan sendiri sudah terselenggara selama 16 tahun di kabupaten Sidrap, tepatnya berdiri pertamakali pada tahun 2000 di UPT SKB Kabupaten Sidrap. SKB Sidrap adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten Sidrap. Sebagai sanggar kegiatan belajar, SKB memfasilitasi dan melayani berbagai kegiatan program pendidikan nonformal, termasuk didalamnya adalah program pendidikan kesetaraan paket C. UPT SKB Sidrap sendiri berdiri sejak tahun 1978. Sampai saat ini UPT SKB Sidrap sudah meluluskan kurang lebih 560 warga belajar pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti (2014) peneliti menyaksikan proses pembelajaran secara langsung sehingga peneliti mengangkat penelitian ini guna memperoleh data yang sebenarnya tentang penyelenggaraan paket C, namun pada saat pelaksanaan penelitian peneliti tidak meneliti secara langsung pada proses pembelajaran warga belajar disebabkan karena belum dimulainya proses pembelajaran sehingga peneliti hanya melakukan proses wawancara secara langsung dengan pihak pengelola dan beberapa orang tutornya saja. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap juga menjadi patokan bagi seluruh PKBM di Kabupaten Sidrap yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan paket C yang

diselenggarakan di SKB Sidrap harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan harus diiringi dengan kinerja yang baik dari pihak pengelola, tutor dan warga belajarnya, agar program pendidikan kesetaraan paket C ini dapat menyetarai sekolah Formal (SMA) dan kinerja tutornya pun harus yang betul-betul berkompeten guna mencapai visi dan misi negara dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sebagai salah satu jenis pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan harus lebih mandiri dalam proses penyelenggaraanya. Di SKB Sidrap sendiri penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masih memiliki berbagai masalah, salah satu diantaranya adalah masalah warga belajar. Warga Belajar kurang termotivasi dalam pelaksanaan pendidikan paket C mereka seperti hanya ingin memperoleh ijazah saja tanpa melalui proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada saat proses Belajar mengajar berlangsung, hanya sedikit dari warga belajar yang hadir.

Presensi warga belajar pendidikan kesetaraan paket C menunjukkan ada 20 orang pada setiap kelompok belajar, namun yang hadir tidak kurang dari 10 orang yaitu sekitar 50% dari jumlah kelompok belajar. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pengelola untuk segera mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Selain permasalahan warga belajar, permasalahan lain juga adalah adanya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C yang jenisnya adalah Swadaya yang pelaksanaannya hanya berlangsung selama 6 bulan. Penyebabnya dikarenakan warga belajar yang ingin memperoleh ijazah tanpa proses pembelajaran tersebut yang menanggung seluruh beban biaya dan ini menjadi pemicu pihak penyelenggara terpengaruh untuk mengadakan penyelenggaraan paket C ini, melihat banyaknya masyarakat yang ingin memperoleh ijazah

dan tidak adanya bantuan pendanaan dari pihak pemerintah untuk program ini. Oleh sebab itu, program yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun dikerucutkan menjadi 6 bulan saja dan program ini sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya di SKB Sidrap.

Peneliti memilih tempat penelitian di SKB Sidrap, hal ini dikarenakan adanya permasalahan tersebut yang muncul sehingga dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di dalam lembaga tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap?
2. Apa saja kendala yang timbul pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Kabupaten Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum ingin memperoleh gambaran tentang:

1. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap
2. Kendala apa yang di timbulkan pada pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Kabupaten Sidrap

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Luar sekolah (PLS) Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dalam mengembangkan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian yang relevan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket C.
- b. Memberi informasi dan masukan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan Pendidikan Kesetaraan Paket C.

